



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1749, 2020

BKPM. Petunjuk Teknis. Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021. Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);

9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 409);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.
4. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal, sejak diberikannya perizinan dan/atau perizinan berusaha.
5. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha adalah kegiatan pelatihan dan lokakarya nonsertifikasi yang diselenggarakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten, dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman ketentuan dan keterampilan dalam pelaksanaan penanaman modal.
6. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah unsur pembantu kepala daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
10. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 terdiri atas kegiatan:
  - a. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
  - b. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal; dan
  - c. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota.

#### Pasal 3

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan

- secara dalam jaringan (daring) oleh pelaku usaha;
- b. identifikasi data perizinan berusaha;
  - c. realisasi penanaman modal di lokasi proyek; dan
  - d. permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

#### Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pencapaian realisasi penanaman modal di daerah;
  - b. pelaksanaan pemenuhan komitmen perizinan berusaha penanaman modal;
  - c. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) oleh pelaku usaha;
  - d. pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup; dan
  - e. pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut atas:
  - a. hasil pelaksanaan kegiatan Pemantauan;
  - b. laporan dari masyarakat tentang adanya indikasi penyimpangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. permintaan dari SKPD dan/atau instansi terkait; dan/atau
  - d. usulan pencabutan perizinan, izin usaha atas perizinan berusaha dan/atau kegiatan usaha dari SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 5

- (1) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;
  - b. sosialisasi kemitraan usaha;

- c. bimbingan teknis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
  - d. bimbingan teknis tata cara penyampaian LKPM *online* perizinan berusaha.
- (2) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan (*luring*) maupun daring.
- (3) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat/pertemuan dengan partisipan pelaku usaha dan narasumber yang kompeten.

#### Pasal 6

- (1) Penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 diklasifikasikan menjadi:
- a. provinsi prioritas;
  - b. provinsi non prioritas;
  - c. kabupaten/kota prioritas; dan
  - d. kabupaten/kota non prioritas.
- (2) Klasifikasi penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
- a. nilai realisasi penanaman modal yang berasal dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di daerah provinsi, kabupaten/kota selama periode 3 (tiga) tahun terakhir dalam melakukan penanaman modalnya di Indonesia dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah; dan/atau
  - b. kondisi aksesibilitas geografis.
- (3) Provinsi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria yaitu:
- a. nilai total realisasi penanaman modal yang dikategorikan besar; dan/atau
  - b. kondisi aksesibilitas geografis yang sulit dijangkau.

- (4) Provinsi non prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria yaitu:
  - a. nilai total realisasi penanaman modal yang dikategorikan kecil; dan/atau
  - b. kondisi aksesibilitas geografis yang mudah dijangkau.
- (5) Kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria yaitu:
  - a. nilai total realisasi penanaman modal yang dikategorikan besar; dan/atau
  - b. kondisi aksesibilitas geografis sulit dijangkau.
- (6) Kabupaten/kota non prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria yaitu:
  - a. nilai total realisasi penanaman modal yang dikategorikan kecil; dan/atau
  - b. kondisi aksesibilitas geografis yang mudah dijangkau.
- (7) Kategori nilai total realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a, dan ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB III

#### KEWENANGAN PENGGUNAAN

##### Pasal 7

Kewenangan penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh:

- a. DPMPSTSP provinsi atas kegiatan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, yaitu:
  1. penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota; dan

2. penanaman modal dalam negeri yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. DPMPTSP kabupaten/kota atas kegiatan berusaha penanaman modal dalam negeri yang menjadi kewenangan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PENGELOLAAN

##### Pasal 8

Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. perencanaan kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

##### Pasal 9

- (1) Terhadap perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, DPMPTSP penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 mengacu pada rincian APBN Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. menu kegiatan; dan
  - b. rincian alokasi DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.

##### Pasal 10

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dianggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Harga satuan biaya DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional.
- (3) Dalam hal standar harga satuan di daerah berbeda dengan standar harga satuan regional yang telah ditetapkan oleh Presiden, daerah dapat menggunakan harga satuan biaya sesuai standar daerah dengan tidak melebihi standar harga satuan regional.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.
- (2) Target output dan alokasi anggaran untuk kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi setiap daerah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BKPM.

#### Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, disampaikan oleh DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 per jenis kegiatan, yang terdiri atas:
  - a. realisasi penyerapan anggaran; dan
  - b. realisasi kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota kepada BKPM, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

- (4) Dalam hal BKPM membutuhkan data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota menyampaikan laporan dimaksud kepada BKPM.

#### Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan terhadap:
  - a. ketepatan waktu penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;
  - c. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
  - d. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota dilaksanakan oleh BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 14

Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan

petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Target output kegiatan dan alokasi anggaran untuk pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Format profil hasil pemantauan pelaku usaha yang dikunjungi ke lokasi proyek untuk pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Format profil hasil pengawasan pelaku usaha yang dikunjungi ke lokasi proyek untuk pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk pengelolaan DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA  
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI  
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

KATEGORI NILAI TOTAL REALISASI PENANAMAN MODAL  
 PROVINSI PENERIMA DAK

| No | Keterangan     | Nilai Total Realisasi Penanaman Modal |
|----|----------------|---------------------------------------|
| 1  | Kategori Besar | $\geq$ Rp15.000.000.000.000,-         |
| 2  | Kategori Kecil | $<$ Rp15.000.000.000.000,-            |

KATEGORI NILAI TOTAL REALISASI PENANAMAN MODAL  
 KABUPATEN/KOTA PENERIMA DAK

| No | Keterangan     | Nilai Total Realisasi Penanaman Modal |
|----|----------------|---------------------------------------|
| 1  | Kategori Besar | $\geq$ Rp200.000.000.000,-            |
| 2  | Kategori Kecil | $<$ Rp200.000.000.000,-               |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA  
ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI  
PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi untuk pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal dalam kerangka pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja

perangkat daerah yaitu DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Kebijakan DAK Nonfisik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai langkah strategis pemerintah dalam menyinkronkan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah.

Berkaitan dengan itu, pemerintah mengalokasikan DAK untuk kegiatan fasilitasi penanaman modal di tingkat provinsi, kabupaten/kota baik yang merupakan prioritas maupun yang non-prioritas. DAK Nonfisik diharapkan dapat mendukung prioritas nasional dalam hal perbaikan kemudahan berusaha yang berawal dari tersebarnya regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal.

#### B. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota dalam memfasilitasi pelaksanaan penanaman modal.
2. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal.

#### C. Sasaran

Sasaran kegiatan DAK Nonfisik adalah:

1. meningkatnya realisasi investasi penanaman modal dari Rp817.200.000.000.000,- (delapan ratus tujuh belas triliun dua ratus miliar rupiah) pada Tahun 2020 menjadi Rp858.500.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan triliun lima ratus miliar rupiah) di Tahun 2021;
2. meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha;
3. meningkatnya jumlah pelaporan kegiatan penanaman modal pelaku usaha di masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota; dan
4. meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup DAK Nonfisik meliputi:

1. Lingkup Wilayah

DAK Nonfisik dialokasikan kepada 34 (tiga puluh empat) pemerintah provinsi dan 508 (lima ratus delapan) pemerintah kabupaten/kota.

2. Lingkup Kegiatan

a. Kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal ditujukan kepada pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Kegiatan pemantauan meliputi:

1. pengumpulan data perizinan berusaha;
2. verifikasi dan evaluasi LKPM melalui sistem OSS menggunakan hak akses yang dimiliki oleh masing-masing DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota;
3. DPMPTSP provinsi melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dengan DPMPTSP kabupaten/kota;
4. penyampaian surat resmi tentang rencana kunjungan ke lokasi proyek kepada pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha yang berisi tentang pejabat dan staf yang ditugaskan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
5. kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal yang difokuskan pada perkembangan realisasi penanaman modal dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas teknis terkait apabila diperlukan;
6. identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha;
7. pembuatan profil proyek hasil kunjungan ke lapangan; dan
8. evaluasi realisasi penanaman modal secara riil sesuai hasil pemantauan dan menuangkannya di dalam LKPM;
9. rapat fasilitasi permasalahan dengan mengundang instansi terkait apabila ada kendala/permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasinya yang dituangkan ke dalam notula rapat fasilitasi permasalahan.

- b. Kegiatan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal dilakukan terhadap pelaku usaha di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Kegiatan pengawasan meliputi:
1. tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan;
  2. DPMPTSP provinsi melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan DPMPTSP kabupaten/kota dan SKPD terkait;
  3. DPMPTSP kabupaten/kota melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan SKPD terkait;
  4. penyampaian surat resmi tentang rencana kunjungan ke lokasi proyek kepada pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha yang berisi tentang pejabat dan staf yang ditugaskan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
  5. kunjungan ke lokasi proyek;
  6. dalam hal pengawasan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha;
  7. pembuatan hasil pengawasan dalam bentuk BAP sesuai dengan format baku dan ditandatangani oleh kedua pihak, baik pelaku usaha maupun instansi yang melakukan kegiatan pengawasan;
  8. pembuatan profil proyek hasil kunjungan ke lapangan; dan
  9. pembuatan laporan hasil pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
- c. Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha PMDN yang berlokasi di masing-masing daerah terkait dengan kegiatan pelaksanaan penanaman modal, diantaranya adalah:

1. sosialisasi kebijakan penanaman modal untuk pelaksanaan perizinan berusaha, diantaranya fasilitas kemudahan berusaha seperti insentif pajak pusat/daerah, dan kemudahan perizinan, serta peraturan daerah terkait dengan penanaman modal;
2. sosialisasi kebijakan penanaman modal untuk mendorong kemitraan usaha skala besar dengan UMKM setempat;
3. bimbingan teknis sistem *online single submission* (OSS): khusus untuk DPMPTSP kabupaten/kota, bimbingan teknis sistem OSS ditambahkan melalui kegiatan pendampingan, yang melibatkan 1 (satu) orang tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b) tingkat pendidikan paling rendah Diploma III;
  - c) memiliki dan memahami perangkat komputer;
  - d) bersedia mengikuti pendidikan/pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM;
  - e) bersedia ditempatkan secara penuh waktu di kantor DPMPTSP selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
  - f) tenaga pendamping dimaksud ditetapkan melalui surat keputusan kepala DPMPTSP kabupaten/kota.
4. Tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertugas:
  - a) memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengisian sistem OSS dan LKPM;
  - b) memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan sistem OSS dan LKPM pada kegiatan Bimbingan Teknis sistem OSS;
  - c) membuat laporan bulanan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada kepala DPMPTSP (Anak Lampiran I).
5. Bimbingan teknis tentang tata cara pengisian LKPM *Online* yang dilaporkan oleh pelaku usaha secara berkala.

E. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan DAK Non Fisik terdiri atas:

a. Kegiatan Pemantauan

1. Profil hasil pemantauan;
2. LKPM untuk kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
3. Notula rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan apabila melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan (Anak Lampiran II).

b. Kegiatan Pengawasan

1. Profil hasil pengawasan;
2. BAP.

c. Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha

Laporan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi memuat informasi antara lain:

1. Peserta dan Absensi;
2. Narasumber;
3. Materi yang disampaikan;
4. Notula kegiatan;
5. Dokumentasi.

F. Kebijakan Operasional

1. Gubernur, bupati/walikota wajib memprioritaskan pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal, serta kemudahan perizinan berusaha.
2. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib mengalokasikan DAK Nonfisik dalam APBD berdasarkan alokasi yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah mendapatkan alokasi DAK Nonfisik menetapkan persentase alokasi penggunaan menu DAK dimaksud secara proporsional.
4. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak dibenarkan melakukan perubahan/pergeseran alokasi DAK Nonfisik yang

diterima berdasarkan alokasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) wajib mempedomani menu/program kegiatan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
6. Perangkat daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan RKA DAK Nonfisik serta menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pengampu DAK Nonfisik.
7. Kepala DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota menunjuk aparatur yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan DAK Nonfisik.
8. Kepala BKPM menunjuk unit yang menangani tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai pengampu teknis DAK Nonfisik.

#### G. Prinsip Dasar

Pemanfaatan DAK Nonfisik berpedoman pada prinsip:

1. Keterpaduan  
Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap bidang dan seksi berdasar struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi.
2. Efisien  
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.
3. Efektif  
Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.
4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Nonfisik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MANAJEMEN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

#### A. Perencanaan Penganggaran

Kepala DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota yang menerima dan melaksanakan DAK Nonfisik, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- a. DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah (provinsi, kabupaten/kota) dibuat perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah dengan mekanisme APBD;
- b. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, prioritas program dalam rangka pencapaian program nasional, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di daerah secara terintegrasi;
- c. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan pagu anggaran masing-masing ditambahkan pagu DAK Nonfisik yang diterima;
- d. RKA yang telah disusun dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota dibahas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) apabila alokasi sudah diterima.
- e. Rencana penggunaan DAK Nonfisik dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan, dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.

#### B. Pengelolaan Anggaran

##### 1. Penggunaan DAK Nonfisik untuk membiayai kegiatan:

###### a. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal,

###### 1) Pemantauan ke lokasi proyek sebagai berikut:

- a) uang harian untuk paling banyak 3 (tiga) orang;
- b) biaya penginapan;
- c) alat tulis kantor; dan
- d) biaya transportasi atau sewa kendaraan.

- 2) Koordinasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal DPMPTSP kabupaten/kota ke DPMPTSP provinsi sebagai berikut:
    - a) uang harian untuk paling banyak 2 (dua) orang;
    - b) biaya penginapan; dan
    - c) biaya transportasi atau sewa kendaraan.
  - 3) Koordinasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota ke BKPM sebagai berikut:
    - a) uang harian untuk paling banyak 2 (dua) orang;
    - b) biaya penginapan; dan
    - c) biaya transportasi atau sewa kendaraan.
- b. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal ke lokasi proyek sebagai berikut:
- 1) uang harian untuk paling banyak 3 (tiga) orang;
  - 2) biaya penginapan
  - 3) alat tulis kantor; dan
  - 4) biaya transportasi atau sewa kendaraan.
- c. Bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha sebagai berikut:
- 1) paket *meeting fullday*;
  - 2) uang saku rapat bagi peserta;
  - 3) honorarium narasumber;  
dengan ketentuan penerima honor adalah:
    - a) non ASN yang memiliki kompetensi di bidang Penanaman Modal termasuk pengajar profesional;
    - b) ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Penanaman Modal dan BKPM yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait penanaman modal, perizinan OSS, maupun LKPM *Online*;
    - c) praktisi langsung yang telah memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem perizinan OSS maupun LKPM daring.
  - 4) honorarium moderator;  
dengan ketentuan penerima honor adalah:
    - a) profesional;
    - b) praktisi;

moderator harus memiliki kecakapan dalam memandu diskusi.

- 5) alat tulis kantor;
  - 6) spanduk;
  - 7) pencetakan materi dan laporan; dan
  - 8) biaya pendampingan berupa upah atau gaji bulanan untuk 1 (satu) orang tenaga pendamping selama 6 (enam) bulan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah;
2. DAK Nonfisik tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanja kuratif dan rehabilitatif, *seminar kit*, honor input data, hadiah lomba, honor panitia, retribusi, cetak foto, pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana.

C. Laporan

- a. DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota menyampaikan laporan realisasi DAK Nonfisik kepada Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat 15 Juli pada tahun berjalan untuk semester 1 dan 15 Januari pada tahun berikutnya untuk semester 2, meliputi :
  - 1) data rekapitulasi hasil kegiatan pemantauan, pengawasan, dan bimbingan teknis/sosialisasi;
  - 2) realisasi penyerapan anggaran;
  - 3) realisasi kegiatan; dan
  - 4) permasalahan dalam pelaksanaan.
- b. Format laporan realisasi penyerapan anggaran berdasarkan pagu alokasi, realisasi kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kegiatan yang sudah direncanakan, dan permasalahan dalam pelaksanaan (Anak Lampiran IV).
- c. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Nonfisik pada tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik dilakukan oleh BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Kementerian/Lembaga terkait. Obyek monitoring dan evaluasi adalah realisasi pencapaian dan kesesuaian target *output* kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

E. Ketentuan Pembiayaan

- a. Perjalanan dinas untuk:
  1. DPMPTSP provinsi hanya dapat digunakan untuk dalam provinsi.
  2. DPMPTSP kabupaten/kota tidak dapat digunakan untuk lintas kabupaten/kota.
- b. Aparatur DPMPTSP kabupaten/kota dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas DAK untuk 2 (dua) orang atas undangan Kepala DPMPTSP provinsi atau yang mewakili sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setahun.
- c. Aparatur DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas DAK untuk 2 (dua) orang atas undangan Kepala BKPM atau yang mewakili sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- d. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), apabila ada komponen ataupun kegiatan di luar ruang lingkup DAK Nonfisik ini, maka penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat diperkenankan menggunakan anggaran DAK Nonfisik.
- e. Kegiatan pendidikan/pelatihan 1 (satu) orang tenaga pendamping DPMPTSP Kabupaten/Kota menggunakan ketentuan: 5 (lima) hari pendidikan/pelatihan ditambah minimal 2 (dua) hari perjalanan dinas disesuaikan dengan letak geografis kabupaten/kota menuju provinsi, Jakarta, dan lokasi kegiatan pendidikan/pelatihan. Jumlah hari kegiatan pendidikan/pelatihan ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM.

BAB III  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2021 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi, kabupaten/kota.

Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik ini merupakan penjelasan atas kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi kemudahan berusaha. Setiap kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran diluar rincian alokasi DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh Kepala BKPM setiap tahunnya.

Kepala DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai minimal jumlah output sesuai dengan alokasi anggaran DAK Nonfisik yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan agar disinergikan dan tidak ada duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD provinsi, kabupaten/kota) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA  
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI  
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

TARGET OUTPUT KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK  
 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
 TAHUN ANGGARAN 2021

| NO        | NAMA DAERAH                    | KLASIFIKASI          | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                    |                     | DANA FASILITASI<br>PENANAMAN<br>MODAL |
|-----------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
|           |                                |                      | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN         | BIMSOS              |                                       |
|           |                                |                      | OUTPUT<br>(PROYEK)             | OUTPUT<br>(PROYEK) | OUTPUT<br>(PESERTA) |                                       |
| (1)       | (2)                            | (3)                  | (4)                            | (5)                | (6)                 | (7)                                   |
| <b>I</b>  | <b>Provinsi Aceh</b>           | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>          | <b>315</b>          | <b>507.467.000</b>                    |
| 1         | Kabupaten Aceh Barat           | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 2         | Kabupaten Aceh Besar           | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 3         | Kabupaten Aceh Selatan         | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 370.982.000                           |
| 4         | Kabupaten Aceh Singkil         | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 5         | Kabupaten Aceh Tengah          | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 6         | Kabupaten Aceh Tenggara        | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 370.982.000                           |
| 7         | Kabupaten Aceh Timur           | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 8         | Kabupaten Aceh Utara           | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 9         | Kabupaten Bireuen              | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 10        | Kabupaten Pidie                | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 11        | Kabupaten Simeulue             | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 12        | Kota Banda Aceh                | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 13        | Kota Sabang                    | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 370.982.000                           |
| 14        | Kota Langsa                    | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 15        | Kota Lhokseumawe               | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 16        | Kabupaten Gayo Lues            | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 370.982.000                           |
| 17        | Kabupaten Aceh Barat Daya      | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 18        | Kabupaten Aceh Jaya            | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 370.982.000                           |
| 19        | Kabupaten Nagan Raya           | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 370.982.000                           |
| 20        | Kabupaten Aceh Tamiang         | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 370.982.000                           |
| 21        | Kabupaten Bener Meriah         | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 22        | Kabupaten Pidie Jaya           | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |
| 23        | Kota Subulussalam              | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 370.982.000                           |
| <b>II</b> | <b>Provinsi Sumatera Utara</b> | <b>Prioritas</b>     | <b>9</b>                       | <b>14</b>          | <b>324</b>          | <b>533.102.000</b>                    |
| 1         | Kabupaten Asahan               | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 326.122.000                           |

| NO         | NAMA DAERAH                    | KLASIFIKASI          | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                 |                  | DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL |
|------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|            |                                |                      | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN      | BIMSOS           |                                 |
|            |                                |                      | OUTPUT (PROYEK)                | OUTPUT (PROYEK) | OUTPUT (PESERTA) |                                 |
| (1)        | (2)                            | (3)                  | (4)                            | (5)             | (6)              | (7)                             |
| 2          | Kabupaten Dairi                | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 3          | Kabupaten Deli Serdang         | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 4          | Kabupaten Karo                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 5          | Kabupaten Labuhanbatu          | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 6          | Kabupaten Langkat              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 7          | Kabupaten Mandailing Natal     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 8          | Kabupaten Nias                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 9          | Kabupaten Simalungun           | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 10         | Kabupaten Tapanuli Selatan     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 11         | Kabupaten Tapanuli Tengah      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 12         | Kabupaten Tapanuli Utara       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 13         | Kabupaten Toba Samosir         | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 14         | Kota Binjai                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 15         | Kota Medan                     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 16         | Kota Pematang Siantar          | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 17         | Kota Sibolga                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 18         | Kota Tanjung Balai             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 19         | Kota Tebing Tinggi             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 20         | Kota Padang Sidempuan          | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 21         | Kabupaten Pakpak Bharat        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 22         | Kabupaten Nias Selatan         | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 370.982.000                     |
| 23         | Kabupaten Humbang Hasundutan   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 24         | Kabupaten Serdang Bedagai      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 25         | Kabupaten Samosir              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 26         | Kabupaten Batu Bara            | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 27         | Kabupaten Padang Lawas         | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 28         | Kabupaten Padang Lawas Utara   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 29         | Kabupaten Labuhanbatu Selatan  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 30         | Kabupaten Labuhanbatu Utara    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 31         | Kabupaten Nias Utara           | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 370.982.000                     |
| 32         | Kabupaten Nias Barat           | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 33         | Kota Gunungsitoli              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| <b>III</b> | <b>Provinsi Sumatera Barat</b> | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>507.467.000</b>              |
| 1          | Kabupaten Limapuluh Kota       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 2          | Kabupaten Agam                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 3          | Kabupaten Kepulauan Mentawai   | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 370.982.000                     |
| 4          | Kabupaten Padang Pariaman      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 5          | Kabupaten Pasaman              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 6          | Kabupaten Pesisir Selatan      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 7          | Kabupaten Sijunjung            | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |

| NO        | NAMA DAERAH                      | KLASIFIKASI          | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                 |                  | DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL |
|-----------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|           |                                  |                      | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN      | BIMSOS           |                                 |
|           |                                  |                      | OUTPUT (PROYEK)                | OUTPUT (PROYEK) | OUTPUT (PESERTA) |                                 |
| (1)       | (2)                              | (3)                  | (4)                            | (5)             | (6)              | (7)                             |
| 8         | Kabupaten Solok                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 9         | Kabupaten Tanah Datar            | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 10        | Kota Bukit Tinggi                | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 11        | Kota Padang Panjang              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 12        | Kota Padang                      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 13        | Kota Payakumbuh                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 14        | Kota Sawahlunto                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 15        | Kota Solok                       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 16        | Kota Pariaman                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 17        | Kabupaten Pasaman Barat          | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 18        | Kabupaten Dharmasraya            | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 19        | Kabupaten Solok Selatan          | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| <b>IV</b> | <b>Provinsi Riau</b>             | <b>Prioritas</b>     | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>533.102.000</b>              |
| 1         | Kabupaten Bengkalis              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 2         | Kabupaten Indragiri Hilir        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 3         | Kabupaten Indragiri Hulu         | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 4         | Kabupaten Kampar                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 5         | Kabupaten Kuantan Singingi       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 6         | Kabupaten Pelalawan              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 7         | Kabupaten Rokan Hilir            | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 8         | Kabupaten Rokan Hulu             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 9         | Kabupaten Siak                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 10        | Kota Dumai                       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 11        | Kota Pekanbaru                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 12        | Kabupaten Kepulauan Meranti      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| <b>V</b>  | <b>Provinsi Jambi</b>            | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>507.467.000</b>              |
| 1         | Kabupaten Batang Hari            | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 2         | Kabupaten Bungo                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 3         | Kabupaten Kerinci                | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 4         | Kabupaten Merangin               | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 5         | Kabupaten Muaro Jambi            | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 6         | Kabupaten Sarolangun             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 7         | Kabupaten Tanjung Jabung Barat   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 8         | Kabupaten Tanjung Jabung Timur   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 9         | Kabupaten Tebo                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 10        | Kota Jambi                       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 11        | Kota Sungai Penuh                | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| <b>VI</b> | <b>Provinsi Sumatera Selatan</b> | <b>Prioritas</b>     | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>533.102.000</b>              |
| 1         | Kabupaten Lahat                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 2         | Kabupaten Musi Banyuasin         | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 3         | Kabupaten Musi Rawas             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 4         | Kabupaten Muara Enim             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 5         | Kabupaten Ogan                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |

| NO          | NAMA DAERAH                          | KLASIFIKASI          | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                 |                  | DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL |
|-------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|             |                                      |                      | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN      | BIMSOS           |                                 |
|             |                                      |                      | OUTPUT (PROYEK)                | OUTPUT (PROYEK) | OUTPUT (PESERTA) |                                 |
| (1)         | (2)                                  | (3)                  | (4)                            | (5)             | (6)              | (7)                             |
|             | Komering Ilir                        |                      |                                |                 |                  |                                 |
| 6           | Kabupaten Ogan Komering Ulu          | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 7           | Kota Palembang                       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 8           | Kota Prabumulih                      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 9           | Kota Pagar Alam                      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 10          | Kota Lubuk Linggau                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 11          | Kabupaten Banyuasin                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 12          | Kabupaten Ogan Ilir                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 13          | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 14          | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 15          | Kabupaten Empat Lawang               | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 16          | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 17          | Kabupaten Musi Rawas Utara           | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| <b>VII</b>  | <b>Provinsi Bengkulu</b>             | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>507.467.000</b>              |
| 1           | Kabupaten Bengkulu Selatan           | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 2           | Kabupaten Bengkulu Utara             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 3           | Kabupaten Rejang Lebong              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 4           | Kota Bengkulu                        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 5           | Kabupaten Kaur                       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 6           | Kabupaten Seluma                     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 7           | Kabupaten Mukomuko                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 8           | Kabupaten Lebong                     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 9           | Kabupaten Kepahiang                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 10          | Kabupaten Bengkulu Tengah            | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| <b>VIII</b> | <b>Provinsi Lampung</b>              | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>507.467.000</b>              |
| 1           | Kabupaten Lampung Barat              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 2           | Kabupaten Lampung Selatan            | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 3           | Kabupaten Lampung Tengah             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 4           | Kabupaten Lampung Utara              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 5           | Kabupaten Lampung Timur              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 6           | Kabupaten Tanggamus                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 7           | Kabupaten Tulang Bawang              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 8           | Kabupaten Way Kanan                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 9           | Kota Bandar Lampung                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 10          | Kota Metro                           | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 11          | Kabupaten Pesawaran                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 12          | Kabupaten Pringsewu                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 13          | Kabupaten Mesuji                     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 14          | Kabupaten Tulang Bawang Barat        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |

| NO        | NAMA DAERAH                 | KLASIFIKASI      | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                 |                  | DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL |
|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|           |                             |                  | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN      | BIMSOS           |                                 |
|           |                             |                  | OUTPUT (PROYEK)                | OUTPUT (PROYEK) | OUTPUT (PESERTA) |                                 |
| (1)       | (2)                         | (3)              | (4)                            | (5)             | (6)              | (7)                             |
| 15        | Kabupaten Pesisir Barat     | Non Prioritas    | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| <b>IX</b> | <b>Provinsi DKI Jakarta</b> | <b>Prioritas</b> | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>523.322.000</b>              |
| <b>X</b>  | <b>Provinsi Jawa Barat</b>  | <b>Prioritas</b> | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>523.322.000</b>              |
| 1         | Kabupaten Bandung           | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 2         | Kabupaten Bekasi            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 3         | Kabupaten Bogor             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 4         | Kabupaten Ciamis            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 5         | Kabupaten Cianjur           | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 6         | Kabupaten Cirebon           | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 7         | Kabupaten Garut             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 8         | Kabupaten Indramayu         | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 9         | Kabupaten Karawang          | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 10        | Kabupaten Kuningan          | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 11        | Kabupaten Majalengka        | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 12        | Kabupaten Purwakarta        | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 13        | Kabupaten Subang            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 14        | Kabupaten Sukabumi          | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 15        | Kabupaten Sumedang          | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 16        | Kabupaten Tasikmalaya       | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 17        | Kota Bandung                | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 18        | Kota Bekasi                 | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 19        | Kota Bogor                  | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 20        | Kota Cirebon                | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 21        | Kota Depok                  | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 22        | Kota Sukabumi               | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 23        | Kota Tasikmalaya            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 24        | Kota Cimahi                 | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 25        | Kota Banjar                 | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 26        | Kabupaten Bandung Barat     | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 27        | Kabupaten Pangandaran       | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| <b>XI</b> | <b>Provinsi Jawa Tengah</b> | <b>Prioritas</b> | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>523.322.000</b>              |
| 1         | Kabupaten Banjarnegara      | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 2         | Kabupaten Banyumas          | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 3         | Kabupaten Batang            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 4         | Kabupaten Blora             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 5         | Kabupaten Boyolali          | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 6         | Kabupaten Brebes            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 7         | Kabupaten Cilacap           | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 8         | Kabupaten Demak             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 9         | Kabupaten Grobogan          | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 10        | Kabupaten Jepara            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 11        | Kabupaten Karanganyar       | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 12        | Kabupaten Kebumen           | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 13        | Kabupaten Kendal            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 14        | Kabupaten Klaten            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |

| NO          | NAMA DAERAH                   | KLASIFIKASI          | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                 |                  | DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL |
|-------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|             |                               |                      | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN      | BIMSOS           |                                 |
|             |                               |                      | OUTPUT (PROYEK)                | OUTPUT (PROYEK) | OUTPUT (PESERTA) |                                 |
| (1)         | (2)                           | (3)                  | (4)                            | (5)             | (6)              | (7)                             |
| 15          | Kabupaten Kudus               | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 16          | Kabupaten Magelang            | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 17          | Kabupaten Pati                | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 18          | Kabupaten Pekalongan          | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 19          | Kabupaten Pemalang            | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 20          | Kabupaten Purbalingga         | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 21          | Kabupaten Purworejo           | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 22          | Kabupaten Rembang             | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 23          | Kabupaten Semarang            | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 24          | Kabupaten Sragen              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 25          | Kabupaten Sukoharjo           | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 26          | Kabupaten Tegal               | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 27          | Kabupaten Temanggung          | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 28          | Kabupaten Wonogiri            | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 29          | Kabupaten Wonosobo            | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 30          | Kota Magelang                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.462.000                     |
| 31          | Kota Pekalongan               | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 32          | Kota Salatiga                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.462.000                     |
| 33          | Kota Semarang                 | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 34          | Kota Surakarta                | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 35          | Kota Tegal                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.462.000                     |
| <b>XII</b>  | <b>Provinsi DI Yogyakarta</b> | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>500.021.000</b>              |
| 1           | Kabupaten Bantul              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.462.000                     |
| 2           | Kabupaten Gunung Kidul        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.462.000                     |
| 3           | Kabupaten Kulon Progo         | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.462.000                     |
| 4           | Kabupaten Sleman              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.462.000                     |
| 5           | Kota Yogyakarta               | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.462.000                     |
| <b>XIII</b> | <b>Provinsi Jawa Timur</b>    | <b>Prioritas</b>     | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>523.322.000</b>              |
| 1           | Kabupaten Bangkalan           | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 2           | Kabupaten Banyuwangi          | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 3           | Kabupaten Blitar              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 4           | Kabupaten Bojonegoro          | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 5           | Kabupaten Bondowoso           | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 6           | Kabupaten Gresik              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 7           | Kabupaten Jember              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 8           | Kabupaten Jombang             | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 9           | Kabupaten Kediri              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 10          | Kabupaten Lamongan            | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 11          | Kabupaten Lumajang            | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 12          | Kabupaten Madiun              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 13          | Kabupaten Magetan             | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 14          | Kabupaten Malang              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 15          | Kabupaten Mojokerto           | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 16          | Kabupaten Nganjuk             | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 17          | Kabupaten Ngawi               | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 18          | Kabupaten Pacitan             | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |

| NO         | NAMA DAERAH                       | KLASIFIKASI          | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                 |                  | DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL |
|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|            |                                   |                      | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN      | BIMSOS           |                                 |
|            |                                   |                      | OUTPUT (PROYEK)                | OUTPUT (PROYEK) | OUTPUT (PESERTA) |                                 |
| (1)        | (2)                               | (3)                  | (4)                            | (5)             | (6)              | (7)                             |
| 19         | Kabupaten Pamekasan               | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 20         | Kabupaten Pasuruan                | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 21         | Kabupaten Ponorogo                | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 22         | Kabupaten Probolinggo             | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 23         | Kabupaten Sampang                 | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 24         | Kabupaten Sidoarjo                | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 25         | Kabupaten Situbondo               | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 26         | Kabupaten Sumenep                 | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 27         | Kabupaten Trenggalek              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 28         | Kabupaten Tuban                   | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 29         | Kabupaten Tulungagung             | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 30         | Kota Blitar                       | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 31         | Kota Kediri                       | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 32         | Kota Madiun                       | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 33         | Kota Malang                       | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 34         | Kota Mojokerto                    | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 35         | Kota Pasuruan                     | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 36         | Kota Probolinggo                  | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 37         | Kota Surabaya                     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.462.000                     |
| 38         | Kota Batu                         | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.462.000                     |
| <b>XIV</b> | <b>Provinsi Kalimantan Barat</b>  | <b>Prioritas</b>     | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>569.703.000</b>              |
| 1          | Kabupaten Bengkayang              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 381.383.000                     |
| 2          | Kabupaten Landak                  | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 381.383.000                     |
| 3          | Kabupaten Kapuas Hulu             | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 381.383.000                     |
| 4          | Kabupaten Ketapang                | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 5          | Kabupaten Mempawah                | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 6          | Kabupaten Sambas                  | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 381.383.000                     |
| 7          | Kabupaten Sanggau                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 8          | Kabupaten Sintang                 | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 381.383.000                     |
| 9          | Kota Pontianak                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 10         | Kota Singkawang                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 11         | Kabupaten Sekadau                 | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 381.383.000                     |
| 12         | Kabupaten Melawi                  | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 381.383.000                     |
| 13         | Kabupaten Kayong Utara            | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 14         | Kabupaten Kubu Raya               | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| <b>XV</b>  | <b>Provinsi Kalimantan Tengah</b> | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>541.468.000</b>              |
| 1          | Kabupaten Barito Selatan          | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 2          | Kabupaten Barito Utara            | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 3          | Kabupaten Kapuas                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 4          | Kabupaten Kotawaringin Barat      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 5          | Kabupaten Kotawaringin Timur      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 6          | Kota Palangkaraya                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 7          | Kabupaten Katingan                | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 8          | Kabupaten Seruyan                 | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 381.383.000                     |

| NO           | NAMA DAERAH                        | KLASIFIKASI          | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                 |                  | DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL |
|--------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|              |                                    |                      | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN      | BIMSOS           |                                 |
|              |                                    |                      | OUTPUT (PROYEK)                | OUTPUT (PROYEK) | OUTPUT (PESERTA) |                                 |
| (1)          | (2)                                | (3)                  | (4)                            | (5)             | (6)              | (7)                             |
| 9            | Kabupaten Sukamara                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 10           | Kabupaten Lamandau                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 11           | Kabupaten Gunung Mas               | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 12           | Kabupaten Pulang Pisau             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 13           | Kabupaten Murung Raya              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 381.383.000                     |
| 14           | Kabupaten Barito Timur             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| <b>XVI</b>   | <b>Provinsi Kalimantan Selatan</b> | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>541.468.000</b>              |
| 1            | Kabupaten Banjar                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 2            | Kabupaten Barito Kuala             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 3            | Kabupaten Hulu Sungai Selatan      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 4            | Kabupaten Hulu Sungai Tengah       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 5            | Kabupaten Hulu Sungai Utara        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 6            | Kabupaten Kotabaru                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 7            | Kabupaten Tabalong                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 8            | Kabupaten Tanah Laut               | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 9            | Kabupaten Tapin                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 10           | Kota Banjarbaru                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 11           | Kota Banjarmasin                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 12           | Kabupaten Balangan                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 13           | Kabupaten Tanah Bumbu              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| <b>XVII</b>  | <b>Provinsi Kalimantan Timur</b>   | <b>Prioritas</b>     | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>569.703.000</b>              |
| 1            | Kabupaten Berau                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 2            | Kabupaten Kutai Kartanegara        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 3            | Kabupaten Kutai Barat              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 4            | Kabupaten Kutai Timur              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 5            | Kabupaten Paser                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 6            | Kota Balikpapan                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 7            | Kota Bontang                       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 8            | Kota Samarinda                     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 9            | Kabupaten Penajam Paser Utara      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 335.173.000                     |
| 10           | Kabupaten Mahakam Ulu              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 381.383.000                     |
| <b>XVIII</b> | <b>Provinsi Sulawesi Utara</b>     | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>502.968.000</b>              |
| 1            | Kabupaten Bolaang Mongondow        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 2            | Kabupaten Minahasa                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 3            | Kabupaten Kepulauan Sangihe        | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 4            | Kota Bitung                        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 5            | Kota Manado                        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 6            | Kabupaten Kepulauan Talaud         | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 7            | Kabupaten Minahasa Selatan         | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 8            | Kota Tomohon                       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 9            | Kabupaten Minahasa                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |

| NO         | NAMA DAERAH                           | KLASIFIKASI          | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                 |                  | DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL |
|------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|            |                                       |                      | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN      | BIMSOS           |                                 |
|            |                                       |                      | OUTPUT (PROYEK)                | OUTPUT (PROYEK) | OUTPUT (PESERTA) |                                 |
| (1)        | (2)                                   | (3)                  | (4)                            | (5)             | (6)              | (7)                             |
|            | Utara                                 |                      |                                |                 |                  |                                 |
| 10         | Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 11         | Kota Kotamobagu                       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 12         | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 13         | Kabupaten Minahasa Tenggara           | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 14         | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 15         | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| <b>XIX</b> | <b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>       | <b>Prioritas</b>     | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>527.703.000</b>              |
| 1          | Kabupaten Banggai                     | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 2          | Kabupaten Banggai Kepulauan           | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 3          | Kabupaten Buol                        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 4          | Kabupaten Toli-Toli                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 5          | Kabupaten Donggala                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 6          | Kabupaten Morowali                    | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 7          | Kabupaten Poso                        | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 8          | Kota Palu                             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 9          | Kabupaten Parigi Moutong              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 10         | Kabupaten Tojo Una Una                | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 11         | Kabupaten Sigi                        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 12         | Kabupaten Banggai Laut                | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 13         | Kabupaten Morowali Utara              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| <b>XX</b>  | <b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>      | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>502.968.000</b>              |
| 1          | Kabupaten Bantaeng                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 2          | Kabupaten Barru                       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 3          | Kabupaten Bone                        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 4          | Kabupaten Bulukumba                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 5          | Kabupaten Enrekang                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 6          | Kabupaten Gowa                        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 7          | Kabupaten Jeneponto                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 8          | Kabupaten Luwu                        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 9          | Kabupaten Luwu Utara                  | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 10         | Kabupaten Maros                       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 11         | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 12         | Kota Palopo                           | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 13         | Kabupaten Luwu Timur                  | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 14         | Kabupaten Pinrang                     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 15         | Kabupaten Sinjai                      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 16         | Kabupaten Kepulauan Selayar           | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 17         | Kabupaten Sidenreng Rappang           | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 18         | Kabupaten Soppeng                     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |

| NO           | NAMA DAERAH                         | KLASIFIKASI          | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                 |                  | DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|              |                                     |                      | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN      | BIMSOS           |                                 |
|              |                                     |                      | OUTPUT (PROYEK)                | OUTPUT (PROYEK) | OUTPUT (PESERTA) |                                 |
| (1)          | (2)                                 | (3)                  | (4)                            | (5)             | (6)              | (7)                             |
| 19           | Kabupaten Takalar                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 20           | Kabupaten Tana Toraja               | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 21           | Kabupaten Wajo                      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 22           | Kota Pare-pare                      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 23           | Kota Makassar                       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 24           | Kabupaten Toraja Utara              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| <b>XXI</b>   | <b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>   | <b>Prioritas</b>     | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>527.703.000</b>              |
| 1            | Kabupaten Buton                     | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 2            | Kabupaten Konawe                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 3            | Kabupaten Kolaka                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 4            | Kabupaten Muna                      | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 5            | Kota Kendari                        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 6            | Kota Bau-bau                        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 7            | Kabupaten Konawe Selatan            | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 8            | Kabupaten Bombana                   | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 9            | Kabupaten Wakatobi                  | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 10           | Kabupaten Kolaka Utara              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 11           | Kabupaten Konawe Utara              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 12           | Kabupaten Buton Utara               | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 13           | Kabupaten Konawe Kepulauan          | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 14           | Kabupaten Kolaka Timur              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 15           | Kabupaten Muna Barat                | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 16           | Kabupaten Buton Tengah              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| 17           | Kabupaten Buton Selatan             | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 367.383.000                     |
| <b>XXII</b>  | <b>Provinsi Bali</b>                | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>530.543.000</b>              |
| 1            | Kabupaten Badung                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 343.813.000                     |
| 2            | Kabupaten Bangli                    | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 343.813.000                     |
| 3            | Kabupaten Buleleng                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 343.813.000                     |
| 4            | Kabupaten Gianyar                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 343.813.000                     |
| 5            | Kabupaten Jembrana                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 343.813.000                     |
| 6            | Kabupaten Karangasem                | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 343.813.000                     |
| 7            | Kabupaten Klungkung                 | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 343.813.000                     |
| 8            | Kabupaten Tabanan                   | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 343.813.000                     |
| 9            | Kota Denpasar                       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 343.813.000                     |
| <b>XXIII</b> | <b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b> | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>530.543.000</b>              |
| 1            | Kabupaten Bima                      | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 2            | Kabupaten Dompu                     | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 3            | Kabupaten Lombok Barat              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 4            | Kabupaten Lombok Tengah             | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 5            | Kabupaten Lombok Timur              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 6            | Kabupaten Sumbawa                   | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 7            | Kota Mataram                        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 343.813.000                     |
| 8            | Kota Bima                           | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 343.813.000                     |

| NO          | NAMA DAERAH                         | KLASIFIKASI      | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                 |                  | DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL |
|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|             |                                     |                  | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN      | BIMSOS           |                                 |
|             |                                     |                  | OUTPUT (PROYEK)                | OUTPUT (PROYEK) | OUTPUT (PESERTA) |                                 |
| (1)         | (2)                                 | (3)              | (4)                            | (5)             | (6)              | (7)                             |
| 9           | Kabupaten Sumbawa Barat             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 10          | Kabupaten Lombok Utara              | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| <b>XXIV</b> | <b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b> | <b>Prioritas</b> | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>556.013.000</b>              |
| 1           | Kabupaten Alor                      | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 2           | Kabupaten Belu                      | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 3           | Kabupaten Ende                      | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 4           | Kabupaten Flores Timur              | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 5           | Kabupaten Kupang                    | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 6           | Kabupaten Lembata                   | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 7           | Kabupaten Manggarai                 | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 8           | Kabupaten Ngada                     | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 9           | Kabupaten Sikka                     | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 10          | Kabupaten Sumba Barat               | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 11          | Kabupaten Sumba Timur               | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 12          | Kabupaten Timor Tengah Selatan      | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 13          | Kabupaten Timor Tengah Utara        | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 14          | Kota Kupang                         | Non Prioritas    | 6                              | 12              | 182              | 343.813.000                     |
| 15          | Kabupaten Rote Ndao                 | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 16          | Kabupaten Manggarai Barat           | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 17          | Kabupaten Nagekeo                   | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 18          | Kabupaten Sumba Barat Daya          | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 19          | Kabupaten Sumba Tengah              | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 20          | Kabupaten Manggarai Timur           | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 21          | Kabupaten Sabu Raijua               | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| 22          | Kabupaten Malaka                    | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 392.223.000                     |
| <b>XXV</b>  | <b>Provinsi Maluku</b>              | <b>Prioritas</b> | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>590.703.000</b>              |
| 1           | Kabupaten Kepulauan Tanimbar        | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 2           | Kabupaten Maluku Tengah             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 3           | Kabupaten Maluku Tenggara           | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 4           | Kabupaten Buru                      | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 5           | Kota Ambon                          | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 6           | Kabupaten Seram Bagian Barat        | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 7           | Kabupaten Seram Bagian Timur        | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 8           | Kabupaten Kepulauan Aru             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 9           | Kota Tual                           | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 10          | Kabupaten Maluku Barat Daya         | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 11          | Kabupaten Buru Selatan              | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| <b>XXVI</b> | <b>Provinsi Papua</b>               | <b>Prioritas</b> | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>849.903.000</b>              |
| 1           | Kabupaten Biak Numfor               | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 2           | Kabupaten Jayapura                  | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |

| NO            | NAMA DAERAH                  | KLASIFIKASI      | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                 |                  | DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL |
|---------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|               |                              |                  | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN      | BIMSOS           |                                 |
|               |                              |                  | OUTPUT (PROYEK)                | OUTPUT (PROYEK) | OUTPUT (PESERTA) |                                 |
| (1)           | (2)                          | (3)              | (4)                            | (5)             | (6)              | (7)                             |
| 3             | Kabupaten Jayawijaya         | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 4             | Kabupaten Merauke            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 5             | Kabupaten Mimika             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 6             | Kabupaten Nabire             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 7             | Kabupaten Paniai             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 8             | Kabupaten Puncak Jaya        | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 9             | Kabupaten Kepulauan Yapen    | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 10            | Kota Jayapura                | Non Prioritas    | 6                              | 12              | 182              | 474.433.000                     |
| 11            | Kabupaten Sarmi              | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 12            | Kabupaten Keerom             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 13            | Kabupaten Yahukimo           | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 14            | Kabupaten Pegunungan Bintang | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 15            | Kabupaten Tolikara           | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 16            | Kabupaten Boven Digoel       | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 17            | Kabupaten Mappi              | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 18            | Kabupaten Asmat              | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 19            | Kabupaten Waropen            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 20            | Kabupaten Supiori            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 21            | Kabupaten Mamberamo Raya     | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 22            | Kabupaten Mamberamo Tengah   | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 23            | Kabupaten Yalimo             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 24            | Kabupaten Lanny Jaya         | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 25            | Kabupaten Nduga              | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 26            | Kabupaten Dogiyai            | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 27            | Kabupaten Puncak             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 28            | Kabupaten Intan Jaya         | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 29            | Kabupaten Deiyai             | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| <b>XXVII</b>  | <b>Provinsi Maluku Utara</b> | <b>Prioritas</b> | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>590.703.000</b>              |
| 1             | Kabupaten Halmahera Tengah   | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 2             | Kota Ternate                 | Non Prioritas    | 6                              | 12              | 182              | 345.663.000                     |
| 3             | Kabupaten Halmahera Barat    | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 4             | Kabupaten Halmahera Timur    | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 5             | Kabupaten Halmahera Selatan  | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 6             | Kabupaten Halmahera Utara    | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 7             | Kabupaten Kepulauan Sula     | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 8             | Kota Tidore Kepulauan        | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 9             | Kabupaten Pulau Morotai      | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| 10            | Kabupaten Pulau Taliabu      | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 393.383.000                     |
| <b>XXVIII</b> | <b>Provinsi Banten</b>       | <b>Prioritas</b> | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>523.322.000</b>              |
| 1             | Kabupaten Lebak              | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 2             | Kabupaten Pandeglang         | Prioritas        | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |

| NO           | NAMA DAERAH                     | KLASIFIKASI          | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                 |                  | DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL |
|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|              |                                 |                      | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN      | BIMSOS           |                                 |
|              |                                 |                      | OUTPUT (PROYEK)                | OUTPUT (PROYEK) | OUTPUT (PESERTA) |                                 |
| (1)          | (2)                             | (3)                  | (4)                            | (5)             | (6)              | (7)                             |
| 3            | Kabupaten Serang                | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 4            | Kabupaten Tangerang             | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 5            | Kota Cilegon                    | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 6            | Kota Tangerang                  | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 7            | Kota Serang                     | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| 8            | Kota Tangerang Selatan          | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 372.462.000                     |
| <b>XXXIX</b> | <b>Provinsi Bangka Belitung</b> | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>507.467.000</b>              |
| 1            | Kabupaten Bangka                | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 2            | Kabupaten Belitung              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 3            | Kota Pangkal Pinang             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 4            | Kabupaten Bangka Selatan        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 5            | Kabupaten Bangka Tengah         | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 6            | Kabupaten Bangka Barat          | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 7            | Kabupaten Belitung Timur        | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| <b>XXX</b>   | <b>Provinsi Gorontalo</b>       | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>       | <b>315</b>       | <b>502.968.000</b>              |
| 1            | Kabupaten Boalemo               | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 2            | Kabupaten Gorontalo             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 3            | Kota Gorontalo                  | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 4            | Kabupaten Pohuwato              | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 5            | Kabupaten Bone Bolango          | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| 6            | Kabupaten Gorontalo Utara       | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 322.573.000                     |
| <b>XXXI</b>  | <b>Provinsi Kepulauan Riau</b>  | <b>Prioritas</b>     | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>533.102.000</b>              |
| 1            | Kabupaten Natuna                | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 370.982.000                     |
| 2            | Kabupaten Kepulauan Anambas     | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 370.982.000                     |
| 3            | Kabupaten Karimun               | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 370.982.000                     |
| 4            | Kota Batam                      | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 5            | Kota Tanjung Pinang             | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| 6            | Kabupaten Lingga                | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 370.982.000                     |
| 7            | Kabupaten Bintan                | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 326.122.000                     |
| <b>XXXII</b> | <b>Provinsi Papua Barat</b>     | <b>Prioritas</b>     | <b>9</b>                       | <b>14</b>       | <b>324</b>       | <b>849.903.000</b>              |
| 1            | Kabupaten Fak Fak               | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 2            | Kabupaten Manokwari             | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 3            | Kabupaten Sorong                | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 4            | Kota Sorong                     | Non Prioritas        | 6                              | 12              | 182              | 474.433.000                     |
| 5            | Kabupaten Raja Ampat            | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 6            | Kabupaten Sorong Selatan        | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 7            | Kabupaten Teluk Bintuni         | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 8            | Kabupaten Teluk Wondama         | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 9            | Kabupaten Kaimana               | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 10           | Kabupaten Maybrat               | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 11           | Kabupaten Tambrauw              | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |
| 12           | Kabupaten Manokwari Selatan     | Prioritas            | 7                              | 13              | 216              | 538.183.000                     |

| NO            | NAMA DAERAH                           | KLASIFIKASI          | TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN |                    |                     | DANA FASILITASI<br>PENANAMAN<br>MODAL |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
|               |                                       |                      | PEMANTAUAN                     | PENGAWASAN         | BIMSOS              |                                       |
|               |                                       |                      | OUTPUT<br>(PROYEK)             | OUTPUT<br>(PROYEK) | OUTPUT<br>(PESERTA) |                                       |
| (1)           | (2)                                   | (3)                  | (4)                            | (5)                | (6)                 | (7)                                   |
| 13            | Kabupaten Pegunungan Arfak            | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 538.183.000                           |
| <b>XXXIII</b> | <b>Provinsi Sulawesi Barat</b>        | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>          | <b>315</b>          | <b>502.968.000</b>                    |
| 1             | Kabupaten Majene                      | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 322.573.000                           |
| 2             | Kabupaten Mamuju                      | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 322.573.000                           |
| 3             | Kabupaten Polewali Mandar             | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 322.573.000                           |
| 4             | Kabupaten Mamasa                      | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 367.383.000                           |
| 5             | Kabupaten Pasangkayu                  | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 322.573.000                           |
| 6             | Kabupaten Mamuju Tengah               | Non Prioritas        | 6                              | 12                 | 182                 | 322.573.000                           |
| <b>XXXIV</b>  | <b>Provinsi Kalimantan Utara</b>      | <b>Non Prioritas</b> | <b>8</b>                       | <b>13</b>          | <b>315</b>          | <b>541.468.000</b>                    |
| 1             | Kabupaten Bulungan                    | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 381.383.000                           |
| 2             | Kabupaten Malinau                     | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 381.383.000                           |
| 3             | Kabupaten Nunukan                     | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 381.383.000                           |
| 4             | Kota Tarakan                          | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 381.383.000                           |
| 5             | Kabupaten Tana Tidung                 | Prioritas            | 7                              | 13                 | 216                 | 381.383.000                           |
|               | <b>JUMLAH PROVINSI</b>                |                      | <b>290</b>                     | <b>460</b>         | <b>10.872</b>       | <b>18.623.240.000</b>                 |
|               | <b>JUMLAH KABUPATEN/KOTA NASIONAL</b> |                      | <b>3.292</b>                   | <b>6.340</b>       | <b>100.752</b>      | <b>185.290.697.000</b>                |
|               |                                       |                      | <b>3.582</b>                   | <b>6.800</b>       | <b>111.624</b>      | <b>203.913.937.000</b>                |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA  
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI  
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT PROFIL HASIL PEMANTAUAN PELAKU USAHA YANG DIKUNJUNGI  
 KE LOKASI PROYEK UNTUK PENGELOLAAN DAK NONFISIK

### Profil Hasil Pemantauan PT. XXX



|   |                              |   |   |  |                              |                        |
|---|------------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------|
| <b>Bidang Usaha dan Lokasi Proyek</b> : |                              |   |   |  |                              |                        |
| NIB :                                   | Tanggal :                    |   |   |  |                              |                        |
| Nama dan Kontak <b>Pelaku usaha</b> :   |                              |   |   |  |                              |                        |
| Perizinan :                             | Izin Lokasi :                | Tanggal :                                   |   |  |                              |                        |
|   | SPPL/UKL-UPL/ AMDAL :        | Tanggal :                                   |   |  |                              |                        |
|   | Izin Lingkungan :            | Tanggal :                                   |   |  |                              |                        |
|   | Izin Mendirikan Bangunan :   | Tanggal :                                   |   |  |                              |                        |
|   | Sertifikat Laik Fungsi :     | Tanggal :                                   |   |  |                              |                        |
|   | Izin Operasional Komersial : | Tanggal :                                   |   |  |                              |                        |
| Investasi dan Tenaga Kerja :            | <b>Komponen</b>              | <b>Rencana (Izin) Rp.</b>                   | <b>Realisasi Pada LKPM (Akumulasi Rp)</b> | <b>Realisasi Saat Ini (Akumulasi Rp)</b> | <b>Jenis</b>                 | <b>Jumlah Saat Ini</b> |
|   | Tanah                        |   |   |  | TKI                          |                        |
|   | Bangunan                     |   |   |  | Laki-laki                    |                        |
|   | Mesin                        |   |   |  | Perempuan                    |                        |
|   | Lain-Lain                    |   |   |  | TKA                          |                        |
|   | Modal Tetap                  |   |   |  | Total                        |                        |
|   | Modal Kerja                  |   |   |  | Permasalahan yang dihadapi : |                        |
|   | Total                        |   |   |  |                              |                        |
| Luas Area :                             | Ha/M2                        |   |   |  |                              |                        |
| Rencana Produksi Komersial :            | Rencana beroperasi pada :    | ( Bulan Tahun) (Bagi yang belum beroperasi) |   |  |                              |                        |
| Realisasi Produksi Komersial :          | Jenis Produk :               | Kapasitas : (Bagi yang sudah beroperasi)    |   |  |                              |                        |
| FOTO PROYEK                             |                              |   |   |  |                              |                        |
| Keterangan Foto                         |                              |   |   |  |                              |                        |
| FOTO PROYEK                             |                              |   |   |  |                              |                        |
| Keterangan Foto                         |                              |   |   |  |                              |                        |

PETUNJUK PENGISIAN PROFIL HASIL PEMANTAUAN PT.XXX

| No   | URAIAN ISIAN  |
|------|---|
| (1)  | Bidang Usaha dan Lokasi Proyek diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Perizinan Berusaha dan alamat lokasi proyek, nama Gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, <i>fax</i> , dan <i>email</i> . |
| (2)  | NIB diisi dengan nomor identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.   |
| (3)  | Nama dan Kontak Pelaku Usaha diisi dengan keterangan penanggung jawab Pelaku Usaha yang mencantumkan nama jelas, jabatan dan nomor <i>handphone</i> .   |
| (4)  | Perizinan diisi dengan nomor dan tanggal Perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha.   |
| (5)  | Investasi diisi dengan nilai rencana investasi, realisasi LKPM pada periode pemantauan, total akumulasi realisasi investasi.  |
| (6)  | Tenaga Kerja diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia baik laki-laki dan perempuan serta tenaga kerja asing diluar jabatan Komisaris dan Direksi.   |
| (7)  | Permasalahan yang dihadapi diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.  |
| (8)  | Luas Area diisi dengan luasan lahan lokasi proyek.  |
| (9)  | Rencana Produksi Komersial diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan produksi/operasi komersial.   |
| (10) | Realisasi Produksi Komersial diisi dengan jenis produk dan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan.   |
| (11) | Foto Proyek diisi dengan dokumentasi terkini kondisi lokasi proyek.   |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA



PETUNJUK PENGISIAN PROFIL HASIL PENGAWASAN PT.XXX

| No   | URAIAN ISIAN   |
|------|--|
| (1)  | Lokasi Proyek diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, <i>fax</i> , dan <i>email</i> .                                    |
| (2)  | KBLI dan Bidang Usaha diisi dengan nomor KBLI dan bidang usaha yang tercantum dalam Perizinan Berusaha   |
| (3)  | Investasi diisi dengan nilai rencana investasi, realisasi LKPM pada periode pemantauan, total akumulasi realisasi investasi.   |
| (4)  | Perizinan diisi dengan nomor dan tanggal Perizinan yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.  |
| (5)  | Jenis/Kapasitas Produksi diisi dengan jenis produk dan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan.  |
| (6)  | Foto Proyek diisi dengan dokumentasi terkini kondisi lokasi proyek.  |
| (7)  | Luas Area diisi dengan luasan lahan lokasi proyek.   |
| (8)  | Progress Produksi/Operasi Komersial diisi dengan target penyelesaian pembangunan proyek dan tanggal dimulainya kegiatan produksi operasi komersial.                              |
| (9)  | Hasil Pengawasan dituangkan dalam formulir BAP.  |
| (10) | Program Pelaku Usaha diisi dengan <i>checklist</i> (√) terhadap pemenuhan tanggung jawab Pelaku Usaha atas kemitraan, CSR, pelatihan tenaga kerja, serta pengelolaan lingkungan. |
| (11) | Kontak Pelaku Usaha diisi dengan keterangan penanggung jawab Pelaku Usaha yang mencantumkan nama jelas, jabatan dan nomor <i>handphone</i> .                                     |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA  
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI  
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor: .../ BAP/ .../ .../ ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari pelaku usaha, telah melakukan pengawasan dalam rangka ...:

I. KETERANGAN PELAKU USAHA

|    |                                      |   |  |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1. | Nama pelaku usaha                    | : |  |
| 2. | Bidang Usaha                         | : |  |
| 3. | Alamat Lokasi<br>Proyek              | : | Jl. :<br>Desa/Kel. :<br>Kec. :<br>Kab./Kota :<br>Provinsi :<br>Kode Pos :<br>Telp. :<br>Fax. : |
| 4. | Penanggung jawab<br>di lokasi proyek | : | Nama :<br>Hp :<br>Email :<br>Fax. :  |

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK  
 PENGAWASAN (dilampirkan)

|    |                         |   |                                      |
|----|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Nomor Induk<br>Berusaha | : | No. Tanggal                          |
| 2. | Izin Usaha              | : | No.<br>Efektif/Belum Berlaku Efektif |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 3. | Izin Komersial/<br>Operasional                               | : | Ada / Tidak Ada<br>No.  |
| 4. | Fasilitas Penanaman<br>Modal                                 | : | No. Tanggal   |
| 5. | Pemenuhan<br>Komitmen atas Izin<br>Usaha                     | : | a. Izin Lokasi: ...<br>b. AMDAL/UKL, UPL, SPPL, dan Izin<br>Lingkungan: ...<br>c. Izin Mendirikan Bangunan: ...<br>d. Sertifikat Laik Fungsi: ... |
| 6. | Pemenuhan<br>Komitmen atas Izin<br>Komersial/<br>Operasional | : | a. Standar: ...<br>b. Sertifikasi: ...<br>c. Lisensi: ...<br>d. Pendaftaran Barang:<br>e. :lain-lain:   |

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

Lembar hasil pemeriksaan di lapangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

| Mengetahui                                | Pemeriksa,  | Tanda Tangan: |
|---|---|---------------|
| Pimpinan/Penanggung<br>Jawab Pelaku Usaha | 1. Koordinator BKPM atau<br>DPMPTSP provinsi,<br>DPMPTSP kabupaten/kota | ...           |
| tanda tangan                              | Nama  | ...           |
| dan cap basah                             | Jabatan   | ...           |
| ... (Nama)<br>... (Jabatan)               | 2. BKPM atau DPMPTSP<br>provinsi, DPMPTSP<br>kabupaten/kota             | ...           |
|   | Nama  | ...           |
|   | Jabatan   | ...           |
|   | 3. Wakil Instansi ...   | ...           |
|   | Nama  | ...           |
|   | Jabatan   | ...           |
|   | 4. Dan seterusnya sesuai<br>kebutuhan                                   |               |

---



---

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

PENOMORAN BAP:

Nomor:     a /BAP/b/c/d

Keterangan : a diisi nomor BAP

b diisi dengan kode instansi yang mengkoordinir pelaksanaan BAP kode instansi:

A = BKPM

(sesuai direktorat wilayah: A.I Direktorat Wilayah I, dst),

B = DPMPTSP Provinsi,

C = DPMPTSP Kabupaten/Kota

c diisi bulan pembuatan BAP (ditulis dalam huruf romawi)

d diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh     : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada bulan November Tahun 2020 sebagai berikut:

01/BAP/A.I/XI/.....(Tahun)

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PELAKU USAHA:

1. Nama Usaha                     : Diisi nama pelaku usaha sesuai izin usaha/ persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bidang usaha                   : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/dan/atau Izin Komersial/ Operasional.
3. Lokasi Proyek                 : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Kode Pos, nomor telepon, dan *fax*.
4. Penanggung jawab di lokasi proyek     : Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat *email* penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN:

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizinan serta perizinan lain yang dimiliki oleh pelaku usaha yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. *Copy* perizinan dilampirkan dalam BAP.

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

1. Hasil pemeriksaan di lapangan dilaksanakan disesuaikan dengan tujuan pengawasan, contoh:

- kepatuhan kewajiban menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan;
- pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia bagi pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- kemitraan sesuai bidang usaha;
- kewajiban Lingkungan UKL/UPL atau AMDAL;
- program CSR bagi pelaku usaha (apabila ada);
- pemanfaatan fasilitas *Tax Holiday, Tax Allowance*, dan/atau *Masterlist* (apabila ada);
- permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha (apabila ada).

2. Apabila pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan, maka obyek utama yang diawasi antara lain (apabila ada):

|  |              |          |             |
|--|--------------|----------|-------------|
| a. Fasilitas impor mesin/peralatan             |              |          |             |
| - Jumlah Nilai dalam SK Pabean                 | : US\$ ..... |          |             |
| - Nilai yang telah diimpor                     | : US\$ ..... |          | (.....%)    |
| - Sisa yang masih akan diimpor                 | : US\$ ..... |          | (.....%)    |
| b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri |              |          |             |
| - Pengadaan Dalam Negeri                       | : Rp .....   |          | (US\$ ....) |
| c. Fasilitas impor barang dan bahan            |              |          |             |
| - Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean      | : .....      | Ton/Unit |             |
| - Volume yang telah diimpor                    | : .....      | Ton/Unit | (.....%)    |
| - Sisa yang belum diimpor                      | : .....      | Ton/Unit | (.....%)    |
| - Jumlah Nilai dalam SK Pabean                 | : US\$       |          |             |
| - Nilai yang telah diimpor                     | : US\$       |          | (.....%)    |
| - Sisa yang masih akan diimpor                 | : US\$       |          | (.....%)    |

Keterangan:

a. Fasilitas impor mesin/peralatan

- Jumlah Nilai dalam SK Pabean  
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*).
- Nilai yang telah diimpor

Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (*PIB/Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan dicek keberadaannya di lokasi proyek.

- Sisa yang masih akan diimpor

Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.

b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri

Dicantumkan nilai mesin/peralatan yang dibeli dari dalam negeri dengan setara dalam *US Dollar*.

c. Fasilitas impor barang dan bahan

- Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean

Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam SK Pabean.

- Volume yang telah diimpor

Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen impor (*PIB/Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean.

- Sisa yang belum diimpor

Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.

- Jumlah Nilai dalam SK Pabean

Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*).

- Nilai yang telah diimpor

Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (*PIB/Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean.

- Sisa yang masih akan diimpor

Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.

Hasil pemeriksaan pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mesin-mesin pokok yang diimpor telah terpasang; (Jika belum

terpasang dijelaskan alasannya dan kenapa)

- b. Kesesuaian jumlah mesin/peralatan pokok yang diimpor dengan jumlah mesin/peralatan pokok yang ada di lokasi proyek; (Jika ada perbedaan, sebutkan alasannya)
- c. Bahan baku yang diimpor dirinci;
- d. berapa yang sudah digunakan;
- e. berapa yang masih ada di gudang (apabila ada perbedaan, agar dijelaskan);
- f. Perkiraan produksi/operasi komersial: bulan... tahun ...
- g. Temuan lain yang dianggap perlu terkait dengan penggunaan fasilitas penanaman modal;
- h. Pemeriksaan kartu kendali (apabila ada).

Membandingkan nilai kuota barang dan bahan berdasarkan dengan nilai yang telah diimpor pada kartu kendali

Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP di lokasi proyek pelaku usaha yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

**ANAK LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN**  
**MODAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA**  
**ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI**  
**PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021**

**LAPORAN BULANAN TENAGA PENDAMPING NON APARATUR SIPIL NEGARA**

| Nomor | Tanggal | Nama Pelaku Usaha<br>(perseorangan/<br>Badan usaha ) | Nama Pelapor | Nomor HP | Permasalahan | Tindakan Pendampingan<br>(bimbingan,konsultasi,asistensi,diseminasi) |
|-------|---------|--|--------------|----------|--------------|--|
| (1)   | (2)     | (3)  | (4)          | (5)      | (6)          | (7)  |
|       |         |  |              |          |              |  |
|       |         |  |              |          |              |  |
|       |         |  |              |          |              |  |

Tempat ..<sup>(8)</sup>, tanggal .....<sup>(9)</sup>  
 Mengetahui,  
 Tenaga Pendamping Non ASN ...<sup>(10)</sup>

(Tanda tangan dan stempel)<sup>(11)</sup>

(.....)<sup>(12)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

| No. | URAIAN  |
|-----|---|
| 1.  | Nomor urut  |
| 2.  | Tanggal pelaporan dari Pelaku Usaha.                |
| 3.  | Nama Pelaku Usaha yang melaporkan.                  |
| 4.  | Nama orang yang melaporkan.                         |
| 5.  | Nomor <i>Handphone</i> orang yang melaporkan.       |
| 6.  | Penjelasan atas permasalahan yang dilaporkan.       |
| 7.  | Jenis tindakan pendampingan yang dilakukan.         |
| 8.  | Diisi tempat dibuatnya laporan.                     |
| 9.  | Diisi tanggal dibuatnya laporan.                    |
| 10. | Diisi nama jabatan.                                 |
| 11. | Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.          |
| 12. | Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan. |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN II  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
 MODAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA  
 ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI  
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN  
 TAHUN : ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ( )
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ( )
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ( )
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN\*)

|    |  |              |  |
|----|--|--------------|--|
| 1. | Nama perusahaan                        | :            |  |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB)             | :            |  |
| 3. | Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial | :            |  |
| 4. | - Akta pendirian/perubahan             | :            | No. Tanggal                            |
|    | - Nama Notaris                         | :            |  |
|    | - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM     | :            | No. Tanggal                            |
| 5. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)         | :            |  |
| 6. | Kelompok Kegiatan Usaha                | :            | (KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha) |
| 7. | Bidang Usaha                           | :            | (KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)   |
| 8. | Alamat lokasi proyek                   | :            | Jl.                                    |
|    |  | Kel.         | Kec.                                   |
|    |  | Kab/Kota     | Prov.                                  |
|    |  | Telp.        | Fax.                                   |
|    |  | <i>Email</i> |  |
| 9. | Alamat Kantor/Korespondensi            | :            | Jl.                                    |
|    |  | Kel.         | Kec.                                   |
|    |  | Kab/Kota     | Prov.                                  |
|    |  | Telp.        | Fax.                                   |
|    |  | <i>Email</i> |  |

I. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.( ) sesuai nilai perolehan awal]

| Investasi                                   | Realisasi periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya | Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan |
|---|---|---|
| 1. Modal Tetap                              |   |   |
| a. Pembelian dan Pematangan Tanah           | :   |   |
| b. Bangunan/Gedung                          | :   |   |
| c. Mesin/Peralatan                          | :(subjumlah otomatis 1-3)   | (subjumlah otomatis 1-3)                        |
| (1). Pembelian dalam negeri                 | :   |   |
| (2). Impor menggunakan fasilitas BKPM       | :   |   |
| (3). Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM | :   |   |
| d. Lain-lain                                | :   |   |
| Sub jumlah                                  | :   |   |
| 2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i> )   | :   |   |
| Total Jumlah Realisasi                      | :   |   |
| Produksi/Operasi Komersial                  | :(Sudah/Belum   |   |

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

| Tenaga Kerja Perusahaan | Realisasi termasuk tenaga kerja kontrak pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan | Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini |
|-------------------------|--|--|
| 1. Indonesia            |  |  |
| - Perempuan             | : ...Orang   | ...Orang   |
| - Laki-laki             | : ...Orang   | ...Orang   |
| 2. Asing                | : ...Orang   | ...Orang   |
| Jumlah                  | : ...Orang   | ...Orang   |

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

III. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI PROYEK

1. Proyek selesai dibangun pada Bulan... Tahun...

2. Proyek Berproduksi/Beroperasi Komersial Bulan... Tahun...
3. Pemenuhan Komitmen:
  - a. Izin Lokasi
  - b. Izin Lingkungan
  - c. IMB
  - d. SLF
  - e. Izin Operasional Komersial
4. Lain-lain (bila diperlukan): ...

#### IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email aktif* di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan, maka dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

(Tempat), (Tanggal) 20...  
Direksi / Kuasa Direksi,  
Selaku Penanggung Jawab LKPM

Nama Jelas :  
Jabatan :  
No. Telepon :  
Email :

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN

---

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagi pelaku usaha dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id> atau <http://lkpmonline.bkpm.go.id>

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Perusahaan : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3. Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4. - Akta Pendirian/perubahan : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen, khususnya Direksi terakhir)
- Nama Notaris : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
- : F : Penarikan data otomatis dari sistem engesahan Menteri Hukum dan HAM OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6. Kelompok Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari sistem

- OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
8. Alamat lokasi proyek : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
9. Alamat Kantor/Korespondensi : Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

## II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal):

### Investasi

1. Nilai realisasi penanaman modal untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
  - 1) Realisasi Periode Pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya adalah nilai realisasi penanaman modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi penanaman modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi penanaman modal ini merupakan nilai perolehan bukan nilai pembukuan perusahaan.
  - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi penanaman modal yang merupakan wujud dari kegiatan nyata yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
  - 3) Komponen realisasi terdiri dari:
    - a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill, dll*).

- b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya.
- c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, termasuk harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi yang terdiri atas:
  - 1. Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
  - 2. Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri yang menggunakan fasilitas pabean berdasarkan keputusan BKPM atas nama Menteri Keuangan.
  - 3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri tanpa menggunakan fasilitas pabean, dalam hal ini termasuk impor menggunakan fasilitas yang tidak diterbitkan dari BKPM.
- d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya *survey*, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial.
- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai memproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.

- f. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
3. Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

### III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan, termasuk tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah TKI dan TKA berdasarkan PKWT/bagi PKWTT/bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini.
5. Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi dengan jumlah tenaga kerja (TKI dan TKA) yang baru diterima selama 3 (tiga) bulan periode LKPM ditambahkan dengan jumlah tenaga kerja baru pada periode sebelumnya yang belum dilaporkan di LKPM.
6. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

### IV. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI PROYEK

1. Disebutkan kapan perkiraan Proyek selesai dibangun dengan menyebutkan Bulan dan Tahunnya.

2. Disebutkan kapan perkiraan Proyek Berproduksi/Beroperasi Komersial dengan menyebutkan Bulan dan Tahunnya.
3. Pemenuhan Komitmen  
Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen). Apabila data belum tersedia di sistem OSS maka dapat dilakukan dengan mengupload di Sistem OSS (sistem terintegrasi) antara lain Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, SLF, Izin Operasional Komersial serta pemenuhan komitmen lainnya.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN:

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan, maka dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL  
TAHAP BERPRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL  
TAHUN ...

## PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ( )
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ( )
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ( )
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ( )

## I. KETERANGAN PERUSAHAAN\*)

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | Nama Perusahaan                        | : |  |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB)             | : |  |
| 3. | Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial | : | No. Tanggal                            |
|    |  |   | Perubahan ke -.....                    |
| 4. | Kelompok Kegiatan Usaha                | : | (KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha) |
| 5. | Bidang Usaha                           | : | (KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)   |
| 6. | Lokasi Proyek                          | : |  |
| 7. | Alamat Korespondensi                   | : |  |

## II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.( ), sesuai nilai perolehan awal]

| A. Investasi   |   | Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan | Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan |
|----------------|---|---|---|
| 1. Modal Tetap | : |   |   |
| 2. Modal Kerja | : |   |   |
| Jumlah         | : |   |   |

\*)Data Keterangan Perusahaan, perizinan dan nonperizinan diatas terintegrasi dengan database sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data perizinan dan non-perizinan ke dalam sistem OSS.

## Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal dan Perkembangan Proyek

|  |
|--|
|  |
|--|

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

| Tenaga Kerja Perusahaan   |   | Realisasi tenaga kerja pada LKPM periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan | Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini |
|---------------------------|---|--|--|
| 1. Indonesia              | : |  |  |
| - Perempuan               |   | ...Orang   | ...Orang   |
| - Laki-Laki               |   | ...Orang   | ...Orang   |
| 2. Asing                  | : | ...Orang   | ...Orang   |
| Total Jumlah Tenaga Kerja |   | ...Orang   | ...Orang   |

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

| No. | Jenis Barang /Jasa | Satuan | Kapasitas Produksi                          |                                      | Ekspor (%) |
|-----|--------------------|--------|---|--------------------------------------|------------|
|     |                    |        | Kapasitas terpasang Sesuai Izin (per tahun) | Realisasi Produksi periode pelaporan |            |
|     |                    |        |   |                                      |            |

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Keterangan: dalam hal bidang usaha dari pelaku usaha diwajibkan bermitra maka sistem LKPM Online terintegrasi dengan Izin Usaha yang ada dalam OSS

1. Kewajiban Divestasi : Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan\*)
2. BPJS Ketenagakerjaan : Sudah/belum\*)
3. Kemitraan dengan UKM :
  - a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan\*)
  - b. Pola Kemitraan:
    - 1) ...
    - 2) ...
  - c. Nama Perusahaan UKM yang bermitra:
    - 1) ...

- 2) ...
4. Pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA\*) : a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA:  
1) ....  
2) ....  
b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga \*)  
c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
- 
5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) : a. Sudah/belum\*) dilaksanakan  
b. Program CSR yang dilakukan:  
1)  
2)  
c. Alokasi biaya program CSR Rp. ...  
d. Output dan outcome yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6. Kewajiban Pengelolaan lingkungan : a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL \*)  
b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7. Lain - lain :
- \*) Pilih salah satu

## VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

|  |
|--|
|  |
|--|

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal) 20...

Direksi/Kuasa Direksi  
Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :  
Jabatan :  
No. Telepon :  
Email :

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL  
TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL

---

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagi pelaku usaha dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id> atau <http://lkpmonline.bkpm.go.id>

PERIODE

LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | Nama Perusahaan                        | : | Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen) |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB)             | : | Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen) |
| 3. | Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial | : | Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen) |
| 4. | Kelompok Kegiatan Usaha                | : | Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen) |
| 5. | Bidang Usaha                           | : | Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen) |
| 6. | Lokasi Proyek                          | : | Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen) |
| 7. | Alamat Korespondensi                   | : | Penarikan data otomatis dari sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen) |

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

1. Nilai untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.
2. Realisasi penanaman modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal.

3. Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap.
- a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dll).
  - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya.
  - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, termasuk harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi yang terdiri atas:
    - 1) Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
    - 2) Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri yang menggunakan fasilitas pabean berdasarkan keputusan BKPM atas nama Menteri Keuangan.
    - 3) Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri tanpa menggunakan fasilitas pabean, dalam hal ini termasuk impor menggunakan fasilitas yang tidak diterbitkan dari BKPM.
  - d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya *survey*, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial.

- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai memproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu turnover pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.
  - f. Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
4. Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

Catatan:

Khusus untuk bidang usaha pertambangan nilai akumulasi berdasarkan penarikan data dari sistem LKPM yang diakumulasikan dalam 1 (satu) tahun kalender pelaporan (Triwulan I, II, III, dan IV tahun pelaporan)

- B. Penjelasan atas realisasi penanaman modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasikan.

### III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erektor*), musiman dan borongan.
4. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini.
6. Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi dengan jumlah jumlah tenaga kerja (TKI dan TKA) yang baru diterima selama 3 (tiga) bulan periode LKPM ditambahkan dengan jumlah tenaga kerja baru pada periode sebelumnya yang belum dilaporkan di LKPM.
7. Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini diisi secara otomatis oleh sistem dengan total tenaga kerja yang pernah disampaikan pada LKPM yang telah disetujui periode sebelumnya ditambahkan dengan realisasi tenaga kerja pada LKPM yang dilaporkan saat ini.

#### IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa: Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Kolom Kapasitas Terpasang sesuai Izin: Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan.
4. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu periode laporan (tiga bulan). Khusus untuk sektor Industri, apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang per tahun yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan terlebih dahulu mengajukan perluasan proyek.
5. Kolom Nilai Ekspor: Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

#### V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi  
Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal.
2. BPJS Ketenagakerjaan

Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

3. Kemitraan

Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/ menengah.

4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing

Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.

5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi proyek.

6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

7. Lain-lain

Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email aktif* di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI  
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN  
MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

NOTULA RAPAT FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Hari/Tanggal : ...  
Waktu : ...  
Tempat : ...  
Pimpinan Rapat : ...  
Agenda Rapat : ...

Hasil pembahasan sebagai berikut:

1. ...
  2. ...
- Dst

Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. ...
  2. ...
- Dst

Demikian, rapat ini dihadiri oleh:

| No. | Instansi | Nama dan Jabatan | Tanda tangan |
|-----|----------|------------------|--------------|
|     |          |                  |              |
|     |          |                  |              |
|     |          |                  |              |

PETUNJUK PENGISIAN NOTULA RAPAT FASILITASI PENYELESAIAN  
PERMASALAHAN

| No  | URAIAN ISIAN   |
|-----|--|
| (1) | Hari/Tanggal diisi dengan hari/tanggal pelaksanaan rapat.  |
| (2) | Waktu diisi dengan jam pelaksanaan rapat.  |
| (3) | Tempat diisi dengan lokasi pelaksanaan rapat.  |
| (4) | Pimpinan Rapat diisi dengan pejabat yang memimpin rapat.   |
| (5) | Agenda Rapat diisi dengan topik pembahasan rapat.  |
| (6) | Hasil Pembahasan diisi dengan penjelasan uraian permasalahan serta usulan penyelesaian dari masing-masing peserta rapat. |
| (7) | Tindak lanjut diisi dengan langkah-langkah penyelesaian permasalahan.  |
| (8) | Masing-masing peserta rapat menandatangani notula rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan.                            |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

**ANAK LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN**  
**MODAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS**  
**NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN**  
**2021**

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL (FPM) PROVINSI, KABUPATEN/KOTA .....(1)**  
**SAMPAI DENGAN TAHAP ..... (2a) TAHUN .....(2b)**

| No  | Jenis Kegiatan   | Perencanaan Kegiatan    |           |                         | Pelaksanaan Kegiatan |        |       | Kesesuaian Antara DPA SKPD dengan Pemungku Tahun | Persentase Output | Kode Efikasi Masalah |    |
|-----|--|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|--------|-------|--|-------------------|----------------------|----|
|     |  | Jumlah Penerima Manfaat | Pagu APBN | Jumlah Penerima Manfaat | Realisasi penggunaan | Ya     | Tidak |  |                   |                      |    |
|     |  | Jumlah                  | Satuan    | (Rp)                    | Jumlah               | Satuan | (Rp)  | %  |                   |                      |    |
| 1   | 2  | 3                       | 4         | 5                       | 6                    | 7      | 8     | 9  | 10                | 11                   | 12 |
| I   | <b>Penanaman Pelaksanaan Penanaman Modal</b>               |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |
| 1   | Verifikasi dan evaluasi LKPM                               |                         | Proyek    |                         |                      | Proyek |       |  |                   |                      |    |
| 2   | Analisis data penilaian berusaha dan penanaman modal       |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |
| 3   | Kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal                 |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |
| II  | <b>Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>              |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |
| 1   | Evaluasi pelaksanaan Perizinan dan atau Perizinan Berusaha |                         | Proyek    |                         |                      | Proyek |       |  |                   |                      |    |
| 2   | Kegiatan pemantauan ke lokasi proyek                       |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |
| 3   | Fasilitas pemantauan dan atau pemantauan investasi         |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |
| III | <b>Biayabagian Teknis/Sosialisasi Kemitrahan Berusaha</b>  |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |
| 1   | Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal                      |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |
| 2   | Sosialisasi Kebijakan Usaha                                |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |
| 3   | Biayak Sistem OSS  |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |
| 4   | Biayak Sistem LKPM Online                                  |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |
|     | <b>TOTAL</b>   |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |
|     | <b>Pagu APBN</b>   |                         |           |                         |                      |        |       |  |                   |                      |    |

Tempat ....., tanggal .....(4)  
 Mengetahui,  
 Kepala DPMPTSP .....(5)  
 (Tanda tangan dan stempel)(6)  
 (.....)(7)  
 NIP.



## PETUNJUK PENGISIAN

| No.         | URAIAN   |
|-------------|--|
| 1           | Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota.   |
| 2 a -b      | Diisi sesuai dengan tahap periode laporan dan tahun anggaran yang dilaporkan.  |
| Kolom 2     | Diisi jenis kegiatan dalam lingkup Dana Fasilitasi Penanaman Modal, yang terdiri dari:<br>I. Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal<br>II. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal<br>III. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha<br>Masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas.  |
| Kolom 3     | Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan FPM   |
| Kolom 4     | Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan FPM   |
| Kolom 5     | Diisi jumlah total pagu . . . . per masing-masing Jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenan  |
| Kolom 6     | Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan FPM.  |
| Kolom 7     | Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan)' penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan FPM.   |
| Kolom 8     | Diisi jumlah realisasi penggunaan Dana BOKB per masing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan.  |
| Kolom 9     | Diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan Dana FPM permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5)   |
| Kolom 10-11 | Diisi kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis  |
| Kolom 12    | Diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan menuliskan kode masalah yang tersedia.<br>Kodefikasi Masalah:<br>1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).<br>2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis.<br>3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.<br>4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD<br>5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan<br>6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak.<br>7. Permasalahan terkait dengan persiapan Pekerjaan Swakelola.<br>8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D.<br>9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak<br>10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola. |
| 3.          | Diisi tempat dibuatnya laporan.  |
| 4.          | Diisi tanggal dibuatnya laporan.   |
| 5.          | Diisi nama jabatan.  |
| 6.          | Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.   |
| 7.          | Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan.  |

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA FASILITASI  
PENANAMAN MODAL (FPM)**

|   |  |
|---|--|
| <p>LAPORAN REALISASI PENYERAPAN<br/>DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL (FPM)<br/>PROVINSI, KABUPATEN/KOTA ... <sup>(1)</sup>TAHUN ANGGARAN ... <sup>(2)</sup><br/>SAMPAI DENGAN TAHAP ... <sup>(3)</sup></p>   |  |
| <p>Yang bertanda tangan di bawah ini ... <sup>4)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Fasilitasi Penanaman Modal</p>  |  |
| <p>A. Sisa Dana Fasilitasi Penanaman Modal di Rekening</p>  |  |
| Kas Umum Daerah tahun sebelumnya  | : Rp <sup>(5)</sup>                                      |
| <p>B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara</p>  |  |
| - Tahap I   | : Rp <sup>(6)</sup>                                      |
| - Tahap II  | : Rp <sup>(7)</sup>                                      |
| Total Penerimaan dari RKUN  | : Rp <sup>(8)</sup> = <sup>(6)</sup> + <sup>(7)</sup>    |
| Jumlah A+B  | : Rp <sup>(9)</sup> = <sup>(5)</sup> + <sup>(8)</sup>    |
| <p>C. Realisasi Penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal melalui SP2D Provinsi, Kabupaten/Kota</p>  |  |
| - Tahap I   | : Rp <sup>(10)</sup>                                     |
| - Tahap II  | : Rp <sup>(11)</sup>                                     |
| - Kumulatif s.d. Tahap ini  | : Rp <sup>(12)</sup> = <sup>(10)</sup> + <sup>(11)</sup> |
| - Pengembalian ke RKUD  | : Rp <sup>(13)</sup>                                     |
| - Realisasi Penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD   | : Rp <sup>(14)</sup> = <sup>(12)</sup> - <sup>(13)</sup> |
| D. Persentase penyaluran  | : Rp <sup>(15)</sup> = <sup>(14)</sup> / <sup>(9)</sup>  |
| E. Sisa Dana Fasilitasi Penanaman Modal di RKUD s.d. Tahap ini  | : Rp <sup>(16)</sup> = <sup>(9)</sup> - <sup>(14)</sup>  |
| <p>Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.<br/>Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.</p> |  |
| <p>Tempat ...<sup>(17)</sup>, Tanggal <sup>(18)</sup><br/>Kepala DPMPTSP <sup>(19)</sup></p>  |  |
| <p>(tanda tangan asli dan stempel basah) <sup>(20)</sup></p>  |  |
| <p>Nama .....<sup>(21)</sup><br/>NIP .....</p>  |  |

## PETUNJUK PENGISIAN

| NO. | URAIAN  |
|-----|---|
| 1.  | Diisi nama provinsi, kabupaten/kota.  |
| 2.  | Diisi tahun anggaran.   |
| 3.  | Diisi tahap berkenaan.  |
| 4.  | Diisi oleh Kepala DPMPTSP.  |
| 5.  | Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana Dana Fasilitas Penanaman Modal di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.  |
| 6.  | Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Fasilitas Penanaman Modal dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.   |
| 7.  | Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Fasilitas Penanaman Modal dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.  |
| 8.  | Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Fasilitas Penanaman Modal yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.   |
| 9.  | Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Fasilitas Penanaman Modal yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.   |
| 10. | Diisi jumlah penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.   |
| 11. | Diisi jumlah penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II. |
| 12. | Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.  |
| 13. | Diisi dengan jumlah dana Dana Fasilitas Penanaman Modal yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.   |
| 14. | Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana Dana Fasilitas Penanaman Modal yang tidak terpakai dan yang  |

| NO. | URAIAN   |
|-----|--|
|     | dikembalikan ke RKUD.  |
| 15. | Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran Dana Fasilitas Penanaman Modal setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa Dana Dana Fasilitas Penanaman Modal di RKUD Tahun sebelumnya. |
| 16. | Diisi jumlah sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal tahap I dan/atau tahap II.  |
| 17. | Diisi tempat dibuatnya laporan.  |
| 18. | Diisi tanggal dibuatnya laporan.   |
| 19. | Diisi nama jabatan.  |
| 20. | Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.   |
| 21. | Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.  |

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA